

DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528600
Fax. 021-23528610

Nomor : *M-1* /PPI.2/SD/12/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Moratorium Pemberlakuan *Non Violation and Situation Complaints (NVSC)* dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*

Jakarta, 19 Desember 2017

Yth.
Ibu Rachmani Hertanti
Executive Director Indonesia for Global Justice (IGJ)
di -
J a k a r t a

Menanggapi surat Saudara No. 045/IGJ.DE/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Permintaan untuk Moratorium Pemberlakuan *Non Violation and Situation Complaints (NVSC)* dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 yang diselenggarakan pada tanggal 10-13 Desember 2017 di Buenos Aires, Argentina, telah menghasilkan beberapa keputusan. Salah satu diantara Keputusan Menteri (*Ministerial Decision*) dimaksud adalah tentang *TRIPS Non-Violation and Situation Complaints* (dokumen WT/MIN(17)/W/7, tanggal 18 Desember 2017).
2. Keputusan Menteri tersebut berisi kesepakatan negara anggota untuk memperpanjang moratorium untuk tidak mengajukan gugatan (*complaint*) berdasarkan prinsip *non violation/situation* atas implementasi *TRIPS Agreement* hingga KTM ke-12 di tahun 2019. Dalam jangka waktu tersebut, pembahasan akan terus dilakukan mengenai cakupan dan modalitas untuk gugatan di bawah pasal 1(b) dan 1(c) pada *Article XXIII GATT* serta merumuskan rekomendasi untuk sesi pembahasan *NVSC* pada KTM ke-12.
3. Indonesia sebagai salah satu co-sponsor *IP/C/W/385* tetap menjaga konsistensi untuk menolak pemberlakuan *NVSC*. Dalam Sidang Reguler *TRIPS Council* setiap tahunnya, Indonesia senantiasa menyuarakan bahwa pemberlakuan *NVSC* dalam *TRIPS Agreement* akan menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi *TRIPS Agreement*, termasuk dengan fleksibilitas yang diatur dalamnya.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Perundingan Multilateral,

Jully Parulhum Tambunan

Tembusan:

1. Dirjen PPI, Kementerian Perdagangan (sebagai laporan);
2. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Dirjen KI, Kementerian Hukum dan HAM

No. 123/2024
Tgl. 15 Januari 2024

Jakarta, 15 Januari 2024

DIHIMPUNG KELOMPOK

Perihal: ...
Terkait: ...

Sehubungan dengan ...
Ditujukan kepada ...

Dengan ini ...
Demikian ...

